

**BIJEENKOMST VOOR FEDERAAL OVERLEG (BFO)
PADA MASA REVOLUSI INDONESIA
TAHUN 1947-1949**

(Skripsi)

Oleh

DEWI CAHYANTI

1913033003



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

BIJEENKOMST VOOR FEDERAAL OVERLEG (BFO) PADA MASA REVOLUSI INDONESIA TAHUN 1947-1949

Oleh

Dewi Cahyanti

Pada masa Revolusi nasional Indonesia terdapat pergolakan yang terjadi baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Salah satu masalah yang muncul adalah upaya Republik Indonesia untuk mendapatkan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka. Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 Belanda bersama Sekutu datang kembali Indonesia dengan membawa gagasan Federalisme bagi Pemerintah Republik Indonesia. Upaya demi upaya dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk mendirikan Negara Federal di Indonesia hingga terbentuknya sebuah badan federal yaitu *Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO). BFO melakukan serangkaian kegiatan untuk berupaya membentuk Negara Federal melalui konferensi-konferensi tertentu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Apasajakah usaha-usaha *Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO) dalam membentuk Negara Federal di Indonesia dan (2) Apasajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan Negara Federal. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui bagaimana usaha-usaha *Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO) dalam membentuk Negara Federal di Indonesia dan (2) untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan Negara Federal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Historis yang meliputi Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Negara Federal di Indonesia diawali dengan konferensi Malino, dilanjutkan dengan konferensi pangkal Pinang dan konferensi Denpasar. Negara Federal pertama yang terbentuk adalah Negara Indonesia Timur, kemudian disusul dengan negara Federal lain seperti Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura dan Negara Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Federalisme, *Bijeenkomst voor Federal Overleg*, Negara Indonesia Serikat.

ABSTRACT

BIJEENKOMST VOOR FEDERAAL OVERLEG (BFO) DURING THE INDONESIAN REVOLUTION 1947-1949

By

Dewi Cahyanti

During the period of the Indonesian National Revolution there were upheavals that occurred both from abroad and from within the country. One of the problems that arises is the Republic of Indonesia's efforts to gain sovereignty as an independent country. After the proclamation of independence on 17 August 1945, the Dutch and the Allies returned to Indonesia with the idea of Federalism for the Government of the Republic of Indonesia. Effort after effort was made by the Dutch government to establish a Federal State in Indonesia until the formation of a federal body, namely Bijeenkomst Voor Federal Overleg (BFO). The BFO undertook a series of activities to attempt to establish a Federal State through certain conferences. The problems in this research are (1) What are the efforts of the Bijeenkomst Voor Federal Overleg (BFO) in forming a Federal State in Indonesia and (2) What are the efforts made by Indonesian figures to support the formation of a Federal State. The aims of this research are (1) to find out how Bijeenkomst Voor Federal Overleg (BFO) has attempted to form a Federal State in Indonesia and (2) to find out the efforts made by Indonesian figures to support the formation of a Federal State. The method used in this research is the Historical Method which includes Heuristics, Criticism, Interpretation and Historiography. The data collection techniques used are library and documentation techniques. The results of this research show that the formation of a Federal State in Indonesia began with the Malino conference, followed by the Pangkal Pinang conference and the Denpasar conference. The first Federal State to be formed was the State of East Indonesia, then followed by other Federal States such as the State of East Sumatra, the State of Pasundan, the State of East Java, the State of Madura and the State of South Sumatra.

Keywords: *Federalism, Bijeenkomst voor Federal Overleg, United States of Indonesia*

**BIJEENKOMST VOOR FEDERAAL OVERLEG (BFO)
PADA MASA REVOLUSI INDONESIA
TAHUN 1947-1949**

Oleh

DEWI CAHYANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: BIJEENKOMST VOOR FEDERAAL OVERLEG
(BFO) PADA MASA REVOLUSI INDONESIA
TAHUN 1947-1949**

Nama Mahasiswa

: Dewi Cahyanti

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1913033003

Jurusan

: Pendidikan IPS

Program Studi

: Pendidikan Sejarah

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

1. MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198112252008121001

Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199007212019032020

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah

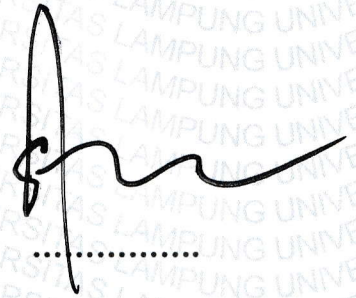
Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP. 197411082005011003

Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197009132008122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.**



Sekretaris : **Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Maskun, M.H.**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M. Si
NIP. 196512301991111001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Agustus 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Cahyanti
NPM : 1913033003
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : Pendidikan P. IPS/FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jalan Kapten Abdul Haq No.13, Kel. Rajabasa, Kec.
Rajabasa, Kota Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2023



Dewi Cahyanti

NPM. 1913033003

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Ciamis (Jawa Barat) pada tanggal 06 Juni 2000, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ade Ruhiyat, dan Ibu Aan Siti Aminah. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Raja Basa pada tahun 2007 dan tamat belajar pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di SMP Negeri 22 Bandar Lampung hingga lulus tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan lulus tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN, dengan ini secara resmi penulis di terima dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung. Dalam rangkaian perkuliahan yang pernah penulis jalani, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pada semester VI di Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dan pada semester sama penulis melaksanakan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Organisasi HIMAPIS (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial) sebagai anggota bidang Kesekretariatan dan Organisasi FOKMA (Forum Komunikasi Mahasiswa) Pendidikan Sejarah sebagai Sekretaris Bidang Hubungan dan Alumni.

MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Bangunlah satu dunia, dimana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan”

(Ir. Soekarno)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur, ku persembahkan sebuah karya ini sebagai tanda cinta dan sayangku kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Ade Ruhiyat dan Ibu Aan Siti Aminah yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran. Terima kasih atas setiap tetes keringat, dan yang selalu membimbing dan mendoakanku agar selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan studi, memberikan semangat dan senantiasa mendoakan keberhasilanku, sungguh semua yang Bapak dan Ibu berikan tak mungkin terbalaskan.

Untuk almamater tercinta

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil 'aalamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat Menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi yang berjudul: **“Bijeenkomst Voor Federaal Overleg (BFO) pada Masa Revolusi Indonesia tahun 1947-1949”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd. Wakil Dekan II Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S. Si., M.Pd. Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari S.Pd., M.Hum. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen Pembimbing I skripsi penulis, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya

selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.

8. Ibu Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., sebagai Pembimbing II skripsi dan Pembimbing Akademik penulis, terima kasih Ibu atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak Drs. Maskun, M.H. sebagai dosen Pembahas skripsi penulis, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
10. Bapak/Ibu dosen dan admin Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Terima kasih banyak atas bantuan, motivasi dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.
11. Adik-adik saya tercinta Khaliza Hasnah Fadhillah dan Yusuf Fajri Naviansyah terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan dengan memberikan semangat dan doa.
12. Teruntuk nenek saya terkasih Ema Neni, terima kasih atas segala doa dan ridhamu yang selalu tercurahkan kepada saya setiap hari.
13. Kerabat saya yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada saya, terima kasih banyak Bibi Nia Agniati Nisa, Aki Aceng J. Anwar, Mamang Azri Al-Faizar Aqmar, Om Mukhlisin dan Bibi Ayi Salamah Dawiyah.
14. Kerabat saya yang membantu dalam proses penelitian skripsi Uwa Totong, Uwa Neng Lia, Uwa Agus Uwa Eka, Mang Heri dan Ateu Aini, terima kasih banyak atas segala bantuan yang telah diberikan.
15. Sahabat saya tercinta yang selalu memberikan motivasi dan mendengarkan segala keluh kesah saya Nurul Assyifa dan Bunga Wahyu Mutiara, semoga persahabatan dan persaudaraan ini terjalin selama-lamanya.
16. Teman seperjuangan Yuliana Widi, Maytufi Azzahra, Anissa Khotijah, Widi Adella dan Shinta Adelia, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi-motivasi yang telah diberikan.

17. Teruntuk sahabat kuliah “*Pretty Girls*” Monica Septiani, Renata Fradila, Sonia Ayuning Pangesty dan Syanila Indah Mawardani terima kasih selalu memberi semangat, dukungan dan bantuan kepada saya selama saya menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah.
18. Teman-teman “*Daycare*” yang selalu mengibur dan memberikan canda tawa Rizky, Rey, Ikhsan, Buliano, Latifah, Ajeng, Feni, Syahna, Gita, Cantika, Intan, Tasia, Oca, Meta, Tina, Aliza, Siti, Andini dan Wanda serta teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamannya.
19. Teruntuk teman-teman remun Kak Ratih Juniarti, Nadira Febri Faradila dan Nuri Muthi Latifah terima kasih atas kerja samanya.
20. Teruntuk saudara se-PA ku Winda Pitriani Parhamah, Yesi Otania Putri, Nuril Huda, M. Ridho Pratama, Ahmad Fariz A.M serta adik-adik angkatan 2020, 2021 dan 2022 terimakasih telah memberikan semangat selama saya menempuh pendidikan.
21. Seluruh teman-teman seperjuangan di Pendidikan Sejarah angkatan 2019 terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya, semua kenangan manis, cinta dan kebersamaan yang tidak akan pernah saya lupakan selama kita melaksanakan kegiatan perkuliahan di Prodi Pendidikan Sejarah tercinta ini.
22. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian atas semua yang telah kalian berikan.

Semoga hasil penulisan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2023

Dewi Cahyanti
1913033003

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5.1. Secara Teoritis	5
1.5.2. Secara Praktis.....	6
1.6. Kerangka Berfikir	7
1.7. Paradigma Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Pustaka	9
2.1.1. Bijeenkomst voor Federaal Overleg	9
2.1.2. Revolusi Nasional Indonesia	10
2.2. Penelitian Terdahulu	11
III. METODOLOGI PENELITIAN	13
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	13
3.1.1. Subjek Penelitian	13
3.1.2. Objek Penelitian	13
3.1.3. Tempat Penelitian	13
3.1.4. Waktu Penelitian	13
3.1.5. Temporal Penelitian	13
3.1.6. Bidang Penelitian	13

3.2. Metode Penelitian	13
3.2.1 Metode Penelitian Historis	14
3.3. Teknik Pengumpulan Data	19
3.3.1. Teknik Kepustakaan	19
3.3.2. Teknik Dokumentasi	19
3.4. Teknik Analisis Data	20
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
4.1. Hasil	22
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	22
4.1.1.1. <i>Bijeenkomst Voor Federaal Overleg</i> (BFO)	22
4.1.1.2. Revolusi Nasional Indonesia.....	26
4.1.2. Deskripsi Data	29
4.1.2.1. Usaha BFO dalam Membentuk Negara Federal	29
4.1.2.1.1 Konferensi 7 Juli 1948	29
4.1.2.1.2 Konferensi 15-18 Juli 1948	30
4.1.2.1.3 Konferensi Pers 27 Juli 1948.....	33
4.1.2.1.4 Pertemuan 15 Januari - 7 Februari 1949	35
4.1.2.1.5 Pertemuan BFO dengan Presiden Republik Indonesia pada Bulan Maret 1949	36
4.1.2.1.6 Nota Perdana Menteri NIT 14-17 April 1949	38
4.1.2.1.7 Konferensi Inter-Indonesia I 19-22 Juli 1949	40
4.1.2.1.8 Konferensi Inter-Indonesia II 31 Juli - 3 Agustus 1949	42
4.1.2.1.9 Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949	44
4.1.2.2 Upaya-upaya tokoh Indonesia dalam Mendukung Pembentukan Negara Federal.....	46
4.1.2.2.1 Menyetujui Pembentukan Negara Bagian di Beberapa Wilayah Indonesia	47
4.1.4.2.2 Terlibat dalam Pemerintahan Belanda	50
4.2. Pembahasan	51
4.2.1. Usaha-usaha BFO dalam membentuk Negara Federal	51
4.2.2. Upaya-upaya tokoh Indonesia dalam Mendukung Pembentukan Negara Federal	53

V. KESIMPULAN DAN SARAN56

5.1. Kesimpulan56

5.2. Saran58

DAFTAR PUSTAKA59**LAMPIRAN****GAMBAR**

DAFTAR GAMBAR

1. Paradigma Penelitian8

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia merupakan awal perjuangan rakyat untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memenuhi hampir keseluruhan kriteria pembentukan negara (Susilo dan Sarkowi, 2021). Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia upaya untuk memperoleh kedaulatan atas wilayah Indonesia terus dilakukan. Disamping upaya Indonesia mengukuhkan kedaulatannya, Sekutu dan Pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal Dr. H.J. van Mook datang kembali ke Indonesia dengan alasan bahwa Belanda merupakan kelompok Sekutu, sebagai pemenang Perang Dunia II Sekutu bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia. Inggris akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas Sekutu sesudah berakhirnya Perang Pasifik (Nusferadi, 2008).

Sekutu membagi tugas atas wilayah Indonesia Barat oleh *South East Asia Command* (SEAC) dibawah komando Laksamana Inggris Lord Louis Mountbatten, sementara itu wilayah Indonesia Timur oleh *South West Pasific Command* (SWPC) dalam wilayah komando Jenderal Douglas Mac Arthur. Tanggung jawab Sekutu adalah melakukan pelucutan senjata tentara Jepang serta melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang, selain itu juga bertugas untuk memulangkan tentara Jepang. Pasukan Sekutu diwakili Inggris datang ke Indonesia pada September 1945 untuk mengurus tawanan perang Jepang dan Belanda. Sekutu juga membawa tentara NICA (*Netherlands Indische Civil Administratie*) yang mewakili pemerintahan Belanda. Tentara NICA mereka punya tujuan mengembalikan kekuasaan Belanda di Inonesia (Kila, 2021). Masuknya AFNEI (*Allied Forces*

Netherlands East Indies) bersama NICA menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda (Syamsuddin dkk, 2022).

Periode 1945-1949 disebut sebagai periode Revolusi Nasional Indonesia, pada saat itu Indonesia mengalami berbagai pergolakan baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Masa revolusi merupakan masa dimana rakyat Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada masa ini rakyat Indonesia dihadapkan pada dua pilihan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu dilakukan dengan cara bertempur secara fisik melalui tindakan militer atau berunding melalui jalur diplomasi (Anggraeini dkk, 2022). Kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidaklah secara langsung membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat penuh. Kemerdekaan Indonesia ditentang oleh Belanda juga dikarenakan Indonesia berada pada posisi *vacuum of power* atau kekosongan dalam kekuasaan. Pada periode ini Indonesia diwarnai dengan perjuangan melawan Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Belanda melakukan serangan-serangan di berbagai wilayah Republik Indonesia mulai akhir tahun 1945 sebagai akibat dari menangnya sekutu atas Jepang (Pratama, 2018). Usaha Belanda untuk menguasai Indonesia dilakukan dengan berbagai cara di antaranya melalui Agresi Militer I tahun 1947 serta Agresi Militer II pada 1948. Pada akhirnya Agresi Belanda selalu diakhiri dengan berbagai proses perundingan (Mursal & Bakaruddin, 2020).

Revolusi Nasional Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Revolusi Fisik dan Diplomasi. Revolusi fisik ditandai dengan munculnya gerakan militer yang dilakukan Belanda untuk menghapus Republik Indonesia, pada fase ini rakyat Indonesia melakukan berbagai upaya militer untuk mengusir Belanda dari tanah air. Sementara itu, Diplomasi merupakan jalan yang ditempuh melalui berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda. Selama Revolusi Nasional melalui diplomasi berlangsung, hasilnya kebanyakan merugikan bangsa Indonesia. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia Hubertus Johannes Van Mook menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Beriringan dengan kedatangan kembali Belanda di Indonesia, Van Mook ingin menjadikan Indonesia sebagai negara

federal. Sistem federal yang terkotak-kotak akan mempermudah Belanda untuk menguasai Indonesia kembali (Tasnur & Fadli, 2019).

Van Mook kemudian mengawali rencana pembentukan negara federal melalui sebuah konferensi di Hooge Veluwe, konferensi ini mengalami kegagalan sebab Belanda juga menginginkan Indonesia berada dibawah persemakmuran Belanda. Van Mook kembali mengadakan konferensi di Malino tanggal 15 sampai 25 Juli 1946. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan bahwa peserta konferensi dengan suara bulat menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi (Sjamsuddin, 2018). Tiga bulan setelah konferensi Malino dilaksanakan pada bulan Oktober 1946, sebuah konferensi diadakan di Pangkalpinang membahas masa depan negara secara terus terang dan berkepanjangan. Van Mook kembali mengadakan konferensi Denpasar. Konferensi tersebut menjadi langkah awal membentuk negara federal di Indonesia, yaitu membentuk Negara Indonesia Timur sebagai negara bagian yang pertama didirikan.

Pada tanggal 19 Desember 1946 wakil-wakil dari Timor, Flores, Sumba dan Sumbawa menjadi satu daerah perwakilan. Negara Indonesia Timur (NIT) yang meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara) dan Kepulauan Maluku. wilayah Negara Indonesia Timur meliputi Karesidenan Sulawesi Selatan, Karesidenan Sulawesi Utara, Karesidenan Bali, Karesidenan Lombok dan Karesidenan Maluku (Nachrawy, 2003). Setelah itu Belanda berhasil membentuk negara-negara dan daerah otonom lainnya di Indonesia. Pada Desember 1946 usaha Van Mook dapat terwujud sedikit-demi sedikit dengan terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) yang disahkan dalam Konferensi Denpasar. Pembentukan NIT menjadi awal dari lahirnya negara-negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Sumatra Timur, Negara Madura, dan Negara Sumatra Selatan (Putro, 2018).

Belanda di bawah Letnan Gubernur Jenderal Van Mook menuju pembangunan federal di daerah yang meliputi sebagian besar bekas Hindia Belanda termasuk Timor. Konstruksi pada tahun 1948 dinegosiasikan melalui Konsultatif Federal

Majelis (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg/BFO*). BFO dibentuk oleh lapisan demi lapisan entitas semi-otonom, masing-masing mempraktikkan politik yang konservatif (Van Klinken, 2014). BFO beranggotakan para pemimpin negara bagian yang sebagian besar merupakan tokoh bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa tokoh pemerintah Indonesia sendiri juga menginginkan Indonesia menjadi negara Federal, itu artinya keputusan Van Mook untuk mendirikan negara Federal didukung oleh beberapa pemimpin pemerintah Republik Indonesia.

BFO disusun pada tahun 1948 oleh Ida Anak Agung Gede Agung selaku perdana menteri Negara Indonesia Timur dan Adil Puradireja Perdana Menteri negara bagian Pasundan. Mereka berkumpul setelah konferensi Bandung yang diselenggarakan oleh Letnan Gubernur Jenderal van Mook di Bandung pada tanggal 8 sampai 15 Juli 1948 (Barink, 2020). Ide dasar negara federal yang paling substansial adalah terjaminnya keadilan dalam alokasi sumber daya, memungkinkan manajemen administrasi menjadi lebih efektif dan efisien karena lingkupnya lebih terbatas (Hasyim, & Mansur, 2015). Perubahan konstitusi di pemerintahan membawa berbagai dampak bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Setelah pembentukan negara federal dan daerah otonom, Belanda mengupayakan penggalangan dukungan membentuk Negara Indonesia Serikat atau Republik Indonesia Serikat yang beraliran federalisme (Susanti, 2013).

Bijeenkomst Voor Federaal Overleg di bawah pimpinan Van Mook dengan berbagai perundingan yang dilakukannya berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara federal. Puncak perundingan BFO terjadi pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Penelitian ini mengarah pada kiat-kiat yang dilakukan *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO) pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1947-1949. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan upaya yang dilakukan oleh *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO) pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1947-1949, serta untuk mengetahui usaha-usaha Belanda dalam mempengaruhi tokoh-tokoh Indonesia untuk mendirikan negara federal, sehingga didapati wawasan lebih

luas terkait sejarah berdirinya Republik Indonesia serta proses yang ditempuh dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian tentang pengembangan media pembelajaran dengan judul **“*Bijeenkomst Voor Federaal Overleg (BFO) Pada Masa Revolusi Indonesia Tahun 1947-1949*”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Usaha-usaha BFO dalam membentuk negara federal.
2. Upaya-upaya tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan negara federal.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Apasajakah usaha-usaha BFO dalam membentuk negara federal?
2. Apasajakah upaya-upaya tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan negara federal?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui usaha-usaha BFO dalam membentuk negara federal.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan negara federal.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan atau manfaat dari penulisan ini yaitu:

1.5.1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah serta tujuan dari penelitian ini, yaitu mengenai konsep-konsep dalam kesejarahan mengenai:

1. Usaha-usaha BFO dalam membentuk negara federal.
2. Upaya-upaya tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan negara federal.

1.5.2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini terbagi menjadi empat bagian, diantaranya yaitu:

a) Bagi Universitas Lampung

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan mengembangkan pengetahuan, khususnya mengenai ilmu sejarah terkhusus pada:

1. Usaha-usaha BFO dalam membentuk negara federal di Indonesia.
2. Upaya-upaya tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan negara federal.

b) Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam menganalisa mengenai ilmu sejarah terkait :

1. Usaha-usaha BFO dalam membentuk negara federal di Indonesia.
2. Upaya-upaya tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan negara federal.

c) Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pandangan bagi penulis terkait ilmu kesejarahan khususnya mengenai :

1. Usaha-usaha BFO dalam membentuk negara federal di Indonesia
2. Upaya-upaya tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan negara federal.

d) Bagi Pembaca

Memperluas pengetahuan para pembaca terkhusus di bidang ilmu kesejarahan dengan topik bahasan :

1. Usaha-usaha BFO dalam membentuk negara federal di Indonesia
2. Upaya-upaya tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan negara federal

1.6. Kerangka Berfikir

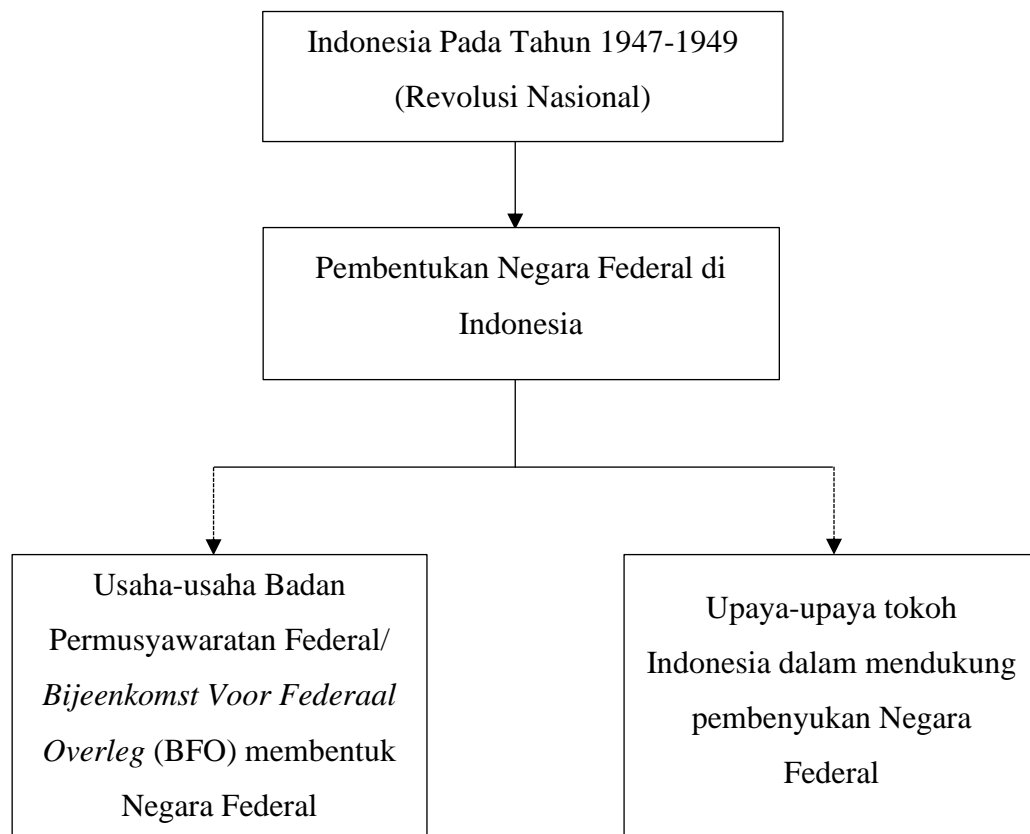
Kerangka berfikir merupakan sebuah deskripsi mengenai keterangan atas teori-teori yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan di kaji atau diteliti. Berdasarkan pemaparan diatas, adapun kerangka berfikir dalam penelian ini adalah sebagai berikut :

Revolusi Nasional Indonesia terjadi karena adanya konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda bersama Sekutu yang diwakili oleh Inggris. Keinginan Belanda untuk menguasai Indonesia kembali menjadi pemicu terjadinya Revolusi Nasional. Pada fase ini Belanda berupaya untuk mendirikan negara federal di Indonesia, pembentukan negara federal di Indonesia melalui berbagai peristiwa dan perundingan yang tidak sedikit. Proses yang dilalui berawal dari konferensi Hooge Veluwe, kemudian konferensi Malino dan konferensi Denpasar oleh Hubertus Johannes Van Mook untuk mengemukakan paham federalisme kepada tokoh-tokoh penting Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1946. Konferensi tersebut melahirkan Negara Indonesia Timur sebagai awal mula terbentuknya negara-negara bagian yang lain seperti Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Madura dan Negara Jawa Timur. Pada bulan Maret 1947 dilakukan perundingan untuk membahas wilayah Indonesia yang disebut perjanjian Linggarjati. Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati dengan melancarkan Agresi Militer I dan II. Untuk menghentikan Agresi Militer Belanda dilakukan beberapa perundingan diantaranya perjanjian Renville, perjanjian Roem-Royen dan diakhiri dengan Konferensi Meja Bundar.

Berkenaan dengan rencana pembentukan negara federal di Indonesia, diperlukan adanya badan yang mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara federal, untuk itu dibentuk Majelis Permusyawaratan Federal atau *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) ditugaskan untuk mengelola Republik Indonesia Serikat pada masa Revolusi Nasional Indonesia. BFO mempunyai usaha-usaha tertentu untuk membentuk Negara Federal di Indonesia, salah satunya adalah memberikan resolusi terkait permasalahan antara Reppublik Indonesia dan Belanda untuk

memberikan rancangan pemerintahan yang dianggap lebih baik bagi Republik Indonesia. Keberhasilan dalam membentuk Negara Federal di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan tokoh-tokoh Indonesia di beberapa wilayah Indonesia, adanya sebuah kepentingan dalam kekuasaan membuat tokoh-tokoh Indonesia tersebut menerima gagasan Federal secara terbuka dan menyetujui pembentukan Negara Federal. Berdasarkan pemaparan di atas BFO dan tokoh-tokoh Indonesia memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan Negara Federal pada masa Revolusi Nasional, maka dari itu penulis memfokuskan penelitian ini pada *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO) pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1947-1949.

1.7. Paradigma Penelitian



Keterangan :

—▶ : Garis sebab

- - -▶ : Garis akibat

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian, dalam tinjauan pustaka akan dicari teori atau konsep yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.1.1. *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg (BFO)*

Bijeenkomst voor Federaal Overleg atau Badan Permusyawaratan Federal adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Belanda untuk mengelola Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada masa Revolusi Nasional Indonesia (1945-1949) (Poesponegoro, Marwati D. Notosusanto, 1984). Komite tersebut terdiri dari lima belas pemimpin negara bagian dalam RIS, dengan masing-masing negara bagian memiliki satu suara. Komite tersebut bertanggung jawab untuk membentuk pemerintahan sementara yang ditetapkan dalam Perjanjian Meja Bundar pada tahun 1948 (Sekretariat Negara RI, 1986). Sebagian besar perwakilan BFO berasal dari luar Jawa, dengan kehadiran Republik yang lebih lemah dan dukungan yang lebih kuat untuk negara federal Belanda BFO dianggap sebagai kolaborator oleh Republik Indonesia karena hubungannya dengan Belanda, tidak percaya pada federalisme dan menganjurkan negara kesatuan Republik Indonesia (Schiller, 1955).

Aksi politik Belanda kedua pada bulan Desember 1948, BFO mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan dimulainya kembali partisipasi bekas pemerintah Republik di Yogyakarta pada Meja Bundar Belanda-Indonesia di Den Haag. Setelah bertemu dengan para pemimpin Republik yang dipenjarakan di Pulau Bangka pada tanggal 3 Maret 1949 dan

serangan balasan yang berhasil di Yogyakarta, BFO kecewa dengan Belanda dan menganjurkan untuk memasukkan Partai Republik dalam sistem negosiasi federal (Rinardi, 2012).

Pembentukan Badan Permusyawaratan Federal (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg* disingkat BFO) tidak terlepas dari pembentukan negara federal Indonesia. Rencana pembentukan federasi di Indonesia pada awalnya digagas oleh Wakil Gubernur Hindia Belanda, Van Mook. Rencana itu menyerukan Van Mook untuk mengubah administrasi negara Indonesia. Sejak berdirinya Republik Indonesia di Indonesia, perubahan ketatanegaraan mengalami hambatan, sehingga Van Mook mencanangkan rencana untuk membentuk negara federal dengan menyebarkan federalisme di Indonesia. Dalam sistem federal sendiri peran yang dimainkan berfokus pada negara bagian, pemerintah federal memiliki kekuasaan dan kewenangan dari negara bagian secara melimpah, meski demikian kewenangan pemerintah federal yang telah disepakati negara-negara bagian juga dapat mengintervensi kekuasaan di seluruh negara bagian (Frederick, 1984).

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BFO merupakan komite yang dibentuk untuk mengelola Republik Indonesia Serikat dibawah pimpinan Van Mook utusan Belanda. BFO melakukan beberapa perundingan dan kesepakatan dengan Indonesia-Belanda agar tercipta pemerintahan baru dibawah naungan federal. Republik Indonesia Serikat lahir dengan ideologi federal yang merupakan kinerja BFO dan Belanda.

2.1.2. Revolusi Nasional Indonesia

Revolusi menjadi alat tercapainya kemerdekaan dan bukan hanya merupakan suatu kisah sentral dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di dalam persepsi bangsa itu sendiri. Revolusi bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya. Terdapat dua cara yang ditempuh dalam Revolusi Nasional Indonesia yaitu Revolusi Fisik dan

Diplomasi. Revolusi Fisik merupakan sebuah Revolusi yang dilakukan melalui senjata dan badan militer, Revolusi Fisik timbul karena adanya konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda.

Diplomasi sendiri merupakan sebuah jalan yang diempuh melalui perundingan atau secara damai. Diplomasi pada dasarnya adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain untuk dapat memahami dan membenarkan sebuah pandangan atau bahkan mungkin mendukung pandangan tersebut tanpa perlu menggunakan kekerasan (Prayuda, 2019). Diplomasi bukan berarti hanya berunding bercakap-cakap, dalam hal lain perdamaian bukan berarti hanya membicarakan hal yang baik-baik. Sebaliknya, perjuangan bukan hanya saling bertinju. Negara kita berjuang berdiplomasi, artinya Republik Indonesia menghendaki perundingan dengan dunia Internasional untuk mempertegak kedaulatan Republik Indonesia (Anggraeini, 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Revolusi Nasional Indonesia merupakan sebuah jalan menuju perubahan yang melibatkan beberapa cara yaitu cara militer dan perundingan. Revolusi Nasional Indonesia menjadi tanda bahwa setelah Indonesia merdeka masih terdapat konflik antara Indonesia dan kerajaan Belanda yang timbul karena ambisi Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai sebuah perbandingan kajian yang hendak dikaji, penelitian dengan topik sejenis pada penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian dengan judul “Dinamika Badan Permusyawarata Federal (BFO) Menuju Kedaulatan Indonesia” yang ditulis oleh Rizqie Novita Sari dan Sugiharti pada tahun 2014. Penelitian ini membahas terkait pembentukan negara federal yang diusulkan oleh H.J Van Mook, dalam pembahasan ini Van Mook melakukan beberapa konferensi untuk menyebarkan paham federal pada tokoh-tokoh Indonesia. kemudian penulis membahas

perbedaan persepsi mengenai BFO dalam pemberitaan surat kabar Merdeka dan surat kabar Pelita Rakjat.

2. Penelitian yang berjudul “Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949: Wujud Konsensus Nasional Antara Republik Indonesia Dengan *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg*” yang disusun oleh Widhi Setyo Putro pada tahun 2018. Penelitian ini mengulas tentang konsensus nasional antara Republik Indonesia (RI) dengan *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) yang diwujudkan dalam Konferensi Inter-Indonesia pada 1949, pembahasan lain dalam penelitian ini yaitu politik Federal Belanda dan pembentukan BFO serta Usaha Awal Konsensus RI-BFO.
3. Penelitian berjudul “*Caught between the Netherlands and the Republic: the position of the Federal Consultative Assembly – ‘Bijeenkomst voor Federaal Overleg’ (BFO) – during the Dutch-Indonesian conflict, 1945-1950*” atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “Terperangkap antara Belanda dan Republik: posisi Majelis Permusyawaratan Federal – ‘*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*’ (BFO) – selama konflik Belanda-Indonesia, 1945-1950” yang disusun oleh Ruben Barink pada tahun 2020 dari Universitas Leiden Belanda. Penelitian ini mengulas agen utama dalam politik kolonial dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat, dalam penelitian ini sang penulis menyebutkan bahwa terdapat beberapa bagian yang tidak disebutkan dalam konflik Belanda-Indonesia selama pembentukan Indonesia menjadi negara federal. Sejarawan Australia George McTurnan Kahin berbicara tentang negara-negara yang “diciptakan Belanda” dan “dipelihara oleh Belanda” yang dipimpin oleh bangsawan lokal pilihan Belanda karena alasan “oportunisme” ekonomi dan politik.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti memberikan penjelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 3.1.1 Subjek Penelitian : *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO)
- 3.1.2 Objek Penelitian : *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO)
Pada Masa Revolusi Indonesia Tahun 1947-1949
- 3.1.3 Penelitian : *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO)
Pada Masa Revolusi Indonesia Tahun 1947-1949
- 3.1.4 Waktu Penelitian : Tahun 2022-2023
- 3.1.5 Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Lampung,
Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- 3.1.6 Konsentrasi : Ilmu Sejarah

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk mengumpulkan informasi secara kritis sehingga pertanyaan peneliti mengenai suatu permasalahan terpenuhi. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian historis.

3.2.1. Metode Penelitian Historis

Berdasarkan pengertian metode penelitian di atas, akan digunakan metode penelitian historis atau metode penelitian sejarah dalam melakukan penelitian ini. Adapun langkah-langkah penelitian yaitu teknik pemilihan topik dan penyusunan rencana penelitian, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Alganih, 2016). Historis termasuk metode berpikir yang diutarakan dalam pemahaman filsafat Karl Marx untuk membebaskan manusia dari dogma dan kultus. Metode historis harus dimulai dari dasar alamiah dan perubahan sepanjang sejarah melalui aktivitas dan pekerjaan manusia berdasarkan kebutuhan. Historis merupakan suatu metode untuk pembentukan nilai kehidupan manusia yang berlangsung secara sistematis dan dialektis adalah sebuah masalah yang sangat urgen untuk diteliti kembali sebagai dasar pembentukan nilai keilmuan yang lebih kompleks dan solutif untuk menjawab berbagai tantangan dalam nuansa yang berbeda dan kompetitif untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Metode secara historis menggambarkan cara untuk mencapai atau membangun sesuatu. Mendekati suatu bidang pengetahuan secara metodis apabila kita mempelajarinya sesuai dengan rencana, mengerjakan bidang-bidangnya yang tertentu, mengatur berbagai kepingan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan (Fuadi, 2015). Metode historis yang tahapannya terdiri dari Heuristik atau pengumpulan sumber, kritik, *Aufassung/Interpretasi*, dan *Darstellung/Historiografi* (Fauzan, & Nashar, 2017). Maka dengan ini metode historis lebih bagus dari metode yang lain karena dalam metode ini mengandung efek jangka waktu yang didapat (Ridha, & Khoiruddin, 2018). Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam metode penelitian historis diantaranya yaitu:

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani Kuno *heuriskein*, yang berarti ‘mencari tahu’ atau ‘menemukan’ (Hertwig & Pachur, 2015). Terminologi heuristik telah digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, meskipun arti sebenarnya yang

dimaksud dengan heuristik di berbagai bidang sangat bervariasi. Pengumpulan data dalam metode historis dapat berupa jejak-jejak sejarah yang berwujud benda seperti candi, sumber-sumber tertulis ataupun tidak tertulis (lisan) (Irwanto & Alian, 2014).

Pengertian heuristik dalam konteks metode sejarah adalah kegiatan mencari sumber-sumber, mendapatkan data, atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Heuristik merupakan suatu teknik, suatu ketrampilan, dan seni dalam mencari dan menemukan sumber (Renier, 1997 dalam Sayono, 2021). Heuristik sebagai kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sejarah, bukanlah kegiatan yang gampang. Diperlukan banyak bekal untuk dapat melaksanakan dengan baik, disamping kegigihan, tenaga dan keuletan, diperlukan beberapa prasarat untuk dapat melakukan heuristik dengan baik (Sayono, 2021). Berdasarkan asalnya sumber sejarah terbagi ke dalam tiga golongan, yakni sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber tertulis secara online melalui *delpher* dengan judul “*Resultaten Van de Ronde Tafel Conferentie, zoals aanvaard tijdens de tweede algemene vergadering welke op 2 November 1949 werd gehouden in de Ridderzaal te's-Gravenhage*”. *Secretariaat-generaal Van de Ronde Tafel Conferentie, Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf*, (1949) atau dalam bahasa Indonesia “Hasil Konferensi Meja Bundar, sebagaimana diterima pada rapat umum kedua yang diadakan pada 2 November 1949 di Ridderzaal di Den Haag”. Sekretariat Jenderal Konferensi Meja Bundar, Perusahaan Percetakan dan Penerbitan Negara, (1949)”. Peneliti juga menggunakan jurnal-jurnal melalui *google scholar* salah satunya berjudul “Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949)”, kemudian sumber juga didapatkan melalui website perpustakaan Universitas Leiden dengan judul “*The Seductress (1955–1965). In The Making of Middle Indonesia*”, selain itu peneliti mengunjungi Perpustakaan Universitas

Lampung, dimana peneliti mendapatkan sumber tertulis lain dengan mengunjungi Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.

2. Kritik

Pada tahap kedua metode sejarah yaitu kritik, baik kritik ekstern maupun kritik ekstern, sering diperlukan sumber baru karena hasil kritik menunjukkan ada informasi yang masih diperlukan atau ketidakjelasan informasi yang ada. Misalnya sumber surat kabar sejaman setempat, secara fisik dijumpai tulisan yang sudah kabur, kemudian juga dijumpai kalimat-kalimat yang memiliki arti ambigu. Dalam kondisi semacam ini walaupun sudah pada tahap kritik, tetap perlu melakukan kembali heuristik untuk dapat melakukan kritik dengan maksimal (Sayono, 2021). Contoh lain adalah kritik ideologis, menyingkap fungsi ideologis, termasuk fungsi sosial-politik yang dikandung oleh teks atau pemikiran tertentu (Syamsuri, 2013). Sejak abad ke-17 kritik sejarah mulai berkembang, hingga akhirnya mencapai taraf kematangannya dalam diri metode sejarah pada abad ke-19. Disiplin atau “ilmu” sejarah baru boleh dianggap telah terbentuk, sesudah metode sejarah dengan kritik sejarah, sebagai intinya mengalami perkembangannya yang pertama (Wasino & Endah Sri, 2018). Jenis kritik sumber terbagi menjadi dua, diantaranya:

- 1) Kritik ekstern berfokus untuk menguji keaslian sumber yang diperoleh dari segi luar seperti jenis kertas yang dipakai pada suatu dokumen atau arsip dan cara penulisannya. Apabila sumber lisan yang digunakan, untuk melakukan kritik ekstern peneliti harus menganalisis dan menelaah sumber-sumber yang ada dengan melihat latar belakang narasumber serta kaitan narasumber dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti memastikan seberapa relevan kesaksian narasumber dengan keadaan yang ada di lapangan (Zainal dkk, 2020). Kritik eksternal merupakan upaya untuk mendapatkan otentisitas sumber berdasarkan penelitian fisik yang dilakukan terhadap suatu sumber. Aspek luar sumber menjadi objek pengujian kritik eksternal (Daliman, 2012).
- 2) Kritik intern dilakukan untuk mendapat kredibilitas atas sumber yang telah terkumpul. Kritik intern berkaitan dengan kredibilitas dari isi

sumber yang akan digunakan. Dari sini dapat diketahui apakah sumber tersebut dapat dipercaya sebagai fakta sejarah atau bukan (Gottslack dalam Zainal dkk, 2020). Tujuan dilakukannya kritik internal tidak lain untuk memahami isi teks, dengan ini latar belakang pikiran dan budaya dari penulis perlu diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan hal yang tersurat bisa saja memiliki perbedaan dengan apa yang tersirat dalam teks atau dokumen. Untuk memahami pernyataan tersirat diperlukan pemahaman dari peneliti itu sendiri (Suhartono, 2014).

Kritik yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara menguji kredibilitas sumber yang berkaitan dengan tema penulisan. Dalam hal ini kritik sumber dilakukan peneliti untuk mencari suatu kebenaran dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah sebagai hasil dari langkah sebelumnya yaitu kritik sumber. Interpretasi merupakan penjabaran dari sumber sejarah yang diperoleh baik berupa data, dokumen maupun hasil wawancara dan observasi. Namun dalam penelitian ini, interpretasi hanya dilakukan untuk memaparkan sumber sejarah berupa dokumen kepustakaan (Hidayat, 2020). Dalam hal ini Pemikiran subyek dalam sejarah rupanya menunjukkan perbedaan antara satu sejarawan dengan yang lain, misalnya interpretasi yang mungkin berbeda-beda antara mereka itu. Ini berarti bahwa pemikiran sejarah tampak ada unsur subyeknya, karena konsep interpretasi berbeda-beda menurut pemikiran sejarawan. Tetapi demikian ada unsur konstan dalam sejarah yaitu prinsip selektif (Rochmiatun, 2013). Sikap subjektivitas diperlukan dalam kondisi tertentu, namun harus diimbangi dengan pemikiran rasional dan sebisa mungkin menghindari subyektivitas emosional. Dalam hal ini sejarawan harus berfikir plurakausal, karena peristiwa yang terjadi disebabkan oleh faktor yang beragam. Dalam melihat satu peristiwa diperlukan penglihatan dari berbagai sudut pandang, hal ini disebut multidimensionalitas dalam sejarah (Rahman,

2017). Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti yakni menafsirkan informasi yang diperoleh dari sumber sejarah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Historiografi

Dalam pembelajaran metode penelitian ilmu sejarah, sering dikenal dengan istilah Historiografi. Kata “Historiograf” dapat dimaknai sebagai hasil atau karya dalam penulisan sejarah. Juga bisa dikatakan sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang di ungkap, diuji (verifikasi), dan dilakukan interpretasi. Setelah empat tahapan awal telah ditempuh, maka sejarawan telah siap untuk melakukan historiografi (penulisan sejarah) (Sukmana, 2021). Metodologi menjadi penting sebagai dasar historiografi sebagai produk dari penelitian sejarah. Historiografi dapat dipahami pula sebagai bentuk wacana atau teks jika dilihat pada pendekatan yang postmodernis. Dalam historiografi terdapat narasi berupa bahasa yang terdiri dari hubungan antara kalimat dan memiliki makna, makna tersebut merupakan suatu kebenaran (Mulyana, 2013). Historiografi juga dapat dikatakan sebagai kesimpulan dari proses penelitian. Historiografi yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan cara penulisan skripsi sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir.

Berdasarkan uraian diatas didapati bahwa langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian untuk mengidentifikasi sumber-sumber sejarah atau peninggalan sejarah disebut dengan metode penelitian sejarah, dimana prosesnya dilakukan secara kritis sehingga data-data dan bukti-bukti tersebut menjadi penelitian kesejarahan yang dapat dipercaya oleh khalayak umum. Metode penelitian sejarah bermanfaat dalam melakukan penyelidikan secara kritis akan situasi di masa lampau, suatu keadaan pada masa lampau dan perkembangan serta pengalaman yang terjadi di masa lampau. Kemudian dari pada itu, metode penelitian sejarah bermanfaat untuk mengetahui validitas sumber-sumber sejarah yang dikaji. Dari sinilah terlahir gambaran yang dapat memberikan pemahaman secara jelas dan mendalam mengenai apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana peristiwa yang terjadi pada masa lampau (Rahman, 2017).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka, peneliti menggunakan:

3.3.1. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan studi yang digunakan untuk menghimpun berbagai informasi yang dibantu oleh berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, kisah-kisah sejarah dan sebagainya (Mardalis dalam Mirzaqon, 2018). Dalam studi kepustakaan peneliti mempunyai kesempatan untuk mempelajari macam-macam referensi berupa buku bahkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang serupa. Hal tersebut berguna bagi peneliti untuk menunjang proses penelitian serta mendapat landasan mengenai topik penelitian (Sarwono dalam Mirzaqon, 2018). Sementara itu, Nazir dalam Sari (2020) menyatakan penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Lebih jauh Sugiyono dalam Sari (2020) berpendapat bahwa penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Membaca dan memahami berbagai sumber tertulis yang ada di perpustakaan maupun tidak dalam rangka mencari sumber atau data yang menunjang penelitian merupakan teknik kepustakaan. Untuk mempermudah kegiatannya peneliti dapat membuat catatan-catatan mengenai data-data dan teori yang dari literatur-literatur yang berhubungan erat dengan penelitian yang dilakukan. Dengan ini peneliti mendapatkan data-data dari berbagai literatur yang berkenaan dengan *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO) pada masa Revolusi Indonesia tahun 1947-1949.

3.3.2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam menelusuri data historis yang berupa informasi mengenai

individu atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi ialah salah satu teknik pengumpulan data berdasarkan peninggalan arsip-arsip, pendapat, teori, dalil-dalil dan hukum-hukum yang termuat dalam buku atau literatur yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Menurut Sugiyono dalam Arischa (2019) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Sementara Arikunto dalam Arischa (2019) menyebutkan dokumentasi adalah upaya seseorang untuk melakukan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan-catatan, transkrip data, buku-buku, surat kabar, jurnal ilmiah, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka disimpulkan bahwa teknik dokumentasi merupakan upaya peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau sumber-sumber dari berbagai media cetak terpercaya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun dokumen berbentuk arsip-arsip serta buku-buku dan foto yang berkaitan dengan *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO) pada masa Revolusi Indonesia tahun 1947-1949.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mencari, menemukan dan menyusun serta menata data-data secara runtut berdasarkan hasil observasi atau catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi dengan cara melakukan pengorganisasian data kedalam satuan unit dan kategori tertentu (Rijali, 2019). Hal tersebut dilakukan untuk menarik dan mendapatkan kesimpulan yang dapat dimengerti oleh orang lain maupun diri sendiri (Arischa, 2019).

Penelitian ini dilakukan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau, untuk itu teknik analisis sumber yang digunakan adalah metode penelitian sejarah atau teknik historis. Teknik analisis data historis merupakan analisis di bidang kesejarahan dengan memanfaatkan kritik sumber sebagai metode dalam memberikan nilai terhadap sumber yang digunakan dalam penelitian mengenai peristiwa di masa

lampau, teknik analisis historis menjadi teknik kajian data yang mengutamakan intensitas yang tinggi ketika interpretasi sejarah dilakukan. Beberapa fakta-fakta sejarah terkadang tidak dapat dimengerti, maka perlu dilakukan interpretasi. Dalam analisis sejarah disediakan suatu konteks pemikiran atau kerangka referensi yang melingkupi beragam teori dan konsep yang hendak digunakan ketika melakukan analisis tersebut. Penelitian historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis (Sari dkk, 2022).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penulis terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil yaitu usaha-usaha BFO dalam membentuk Negara Federal di Indonesia dan upaya-upaya tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan Negara Federal.

1. Usaha-usaha BFO dalam membentuk Negara Federal di Indonesia yaitu dengan melakukan berbagai perundingan yang berkenaan dengan pembentukan Negara Indonesia Serikat. BFO beranggotakan negara-negara federal yang didirikan oleh Belanda yang meliputi 6 Negara Bagian (Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Madura, Negara Pasundan dan Negara Sumatra Selatan) dan 9 daerah otonom (Banjar, Bangka, Belitung, Jawa Tengah, Borneo Timur, Groot Dayak, Riau, Federasi Kalimantan Tenggara dan Borneo Barat). Adanya perbedaan pendapat dalam anggota BFO tidak menjadi hambatan untuk mendirikan Negara Federal di Indonesia. Perjuangan BFO dalam membentuk negara Federal yaitu meyakinkan Indonesia bahwa sistem negara yang baik bagi RI pada saat itu adalah federal.

BFO mengupayakan Indonesia tergabung dalam Pemerintah Federal Interim atau Pemerintah Federal Sementara. BFO melakukan perundingan dengan Republik Indonesia yaitu pada Konferensi Inter-Indonesia yang membahas substansial pembentukan Negara Indonesia Serikat yang tersusun atas dasar-dasar negara Republik Indonesia namun dengan sistem federal. Pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda, BFO sebagai badan resmi dan menjadi salah satu delegasi dalam perundingan tersebut dan memihak Republik Indonesia agar Republik Indonesia menyetujui

pembentukan Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat kemudian berdiri pada 27 Desember 1949 dengan total 7 Negara Bagian dan 9 Daerah Otonom.

2. Upaya-upaya tokoh Indonesia dalam mendukung pembentukan Negara federal dilakukan dengan menerima dan menyetujui pembentukan negara Federal. Tokoh Indonesia juga terlibat dalam pembentukan negara federal tersebut melalui badan Permusyawaratan Federal (BFO). Pembentukan Negara Federal ini tidak akan terlaksana tanpa adanya persetujuan dari tokoh Indonesia itu sendiri, hal tersebut dipicu oleh beberapa wilayah Indonesia sedang berada pada situasi kacau setelah pendudukan Jepang di Indonesia. Pasca pendudukan Jepang di Indonesia, begitu banyak kerugian yang ditimbulkan baik itu di bidang ekonomi maupun infrastruktur. Para tokoh yang menerima gagasan Federal Indonesia berharap dengan dibentuknya pemerintah Federal ini maka Indonesia dapat bekerja sama dengan Belanda untuk memulihkan situasi bangsa Indonesia.

Penyetujuan pembentukan negara Federal di Indonesia sebetulnya juga timbul dari kekhawatiran terkait masa depan Indonesia yang dapat ditinjau dari hadirnya berbagai pergolakan dalam negeri, dimana Republik Indonesia sendiri tidak dapat mengatasi hal tersebut. Terdapat tokoh Indonesia yang tidak ingin menyerahkan kekuasaannya di suatu wilayah menjadi pemicu lahirnya Negara Federal. Berlakunya sistem Federal Indonesia dengan Negara Bagian dan Daerah Otonom juga dianggap lebih mudah dalam mengatur pemerintahan, hal tersebut karena setiap Negara Bagian dan Daerah Otonom dikelola oleh masing-masing pemimpin sehingga dianggap dapat menghindari perpecahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran-saran yang diberikan sebagai masukan, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Pada penulisan kata atau kalimat harus ditulis dengan jelas terlebih pada makna atau isi tulisan itu sendiri. Perlu adanya penelitian lanjutan oleh para ahli mengenai tokoh-tokoh Indonesia lain yang terlibat dalam mendukung pembentukan Negara Federal di Indonesia.

2. Bagi Pembaca

Para pembaca diharapkan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pasca kemerdekaan Republik Indonesia salah satunya adalah usaha-usaha *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* pada masa Revolusi Indonesia tahun 1947-1949 dalam mendirikan Negara Federal. Diperlukan pula adanya pembinaan bagi masyarakat akan kesadaran pentingnya arsip sebagai simbol pemersatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. A. A. G. (1985). *Dari Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yayasan Obor Indonesia.
- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(2).
- Anggraeini, P. D., Susanto, H., & Pratama, R. A. (2022). Revolusi Indonesia Dalam Perspektif Pro Dan Kontra Pers Nasional Periode Pasca Proklamasi Hingga Tercapainya Pengakuan Kedaulatan. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 35-58.
- Arischa, S. (2019). Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 6, 1–15.
- Barink, R. (2020). *Caught between the Netherlands and the Republic: the position of the Federal Consultative Assembly – 'Bijeenkomst voor Federaal Overleg' (BFO) – during the Dutch-Indonesian conflict*. Leiden University.
- Budiman, A. (2019). Sejarah diplomasi roem-roijen dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan republik indonesia tahun 1949. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 4(1), 86–122.
- Budiarto, S. K., & Melay, R. Sejarah Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (Ris) Sampai Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1949-1950. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1-15.
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Ombak.
- Dienaputra, R. D. (2011). *Sunda: sejarah, budaya, dan politik*. Sastra Unpad Press.
- Falah, M. Z. N., & Hanafi, B. R. (2022). Pembentukan Republik Indonesia Serikat

(Ris) Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2), 152-168.

Fatoni, R. A. (2022). *Sejarah Diplomasi: Menelaah perjalanan kedaulatan hasil KMB hingga terjadinya pembatalan KMB pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II 1949-1956*. Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Fauzan, R., & Nashar, N. (2017). Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang). *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 3(1), 1–9.

Frederick, W. H. (1984). *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. LP3ES.

Fuadi, F. (2015). Metode Historis: Suatu Kajian Filsafat Materialisme Marx. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 219–230.

H. J. Alferink, Z. (1949). *Resulatie Federaal Overleg. Nieuw Overijsels Dagblad*.

Hasyim, R., & Mansur, M. (2015). Sultan Ternate Iskandar Jabir Syah: Dari Konferensi Malino Hingga Menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950. *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan*, 2(1), 22–32.

Hertwig, R and Pachur, T. (2015). “*Heuristics, History of*”, dalam *International Encyclopedoa of the Social*. 10(2), 829–835.

Hidayat, B. (2020). Tinjauan Historis Pendidikan IPS di Indonesia. *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia*, 4(2), 147–154.

Irwanto, D, Alian, S. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Eja Publisher.

Isnaeni, F. H. (2018). *Negara Jawa Timur*. PT Media Digital Historia. <https://historia.id/politik/articles/negara-jawa-timur-PKkbp/page/1>

J. Plebenga, C. V. B. (1949). *Hatta naar rondetafelconferentie*. Leeuwarder

Courant.

- J. C. Kolting. (1949). *Bij Het Samenstellen van de eerste Regering van de RIS de Vier Kabinetsformateurs I*. Nieuwe Courant.
- Kahin, G. M. (2003). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Kartodirjo, S. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khaldun, I. (2021). Politik Diplomasi Masa Revolusi Menuju Pengakuan kemerdekaan Indonesia (1946-1949). *Sosiohumaniora : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 122–131.
- Khamsyahurrahman. (2015). *Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat 1946-1950*. IKIP PGRI Pontianak. <http://digilib.ikipgripta.ac.id/429/>
- Kila, K. (2021). *Perang Appa" Sulapa" dalam Menghadapi Agresi Belanda di Malino*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Meri, D. (2021). Mengapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Di Bukittinggi (Sumatera Barat). *Jurnal Edukasi*, 1(1), 38–45.
- Mirzaqon, A. T. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1), 1–8.
- Muller, C. A. (1949). *De inter-Indonesische conferentie. De Bredasche Courant*.
- Mulyana, A. (2013). Nasionalisme dan militerisme: Ideologisasi historiografi buku teks pelajaran sejarah SMA. *Paramita: Historical Studies Journal*, 23(1).
- Mursal, I. F., & Bakaruddin, L. (2020). Lima Negara Bagian Terpenting dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 217–230.

- Nachrawy, H. I. (2003). *Peranan Ternate Tidore dalam pembebasan Irian Barat*. Yayasan Kie Raha.
- Notosusanto, N. (1985). *Ikhtisar Sejarah RI 1945 - Sekarang*. Departemen Pertahanan Keamanaa, Pusjarah ABRI.
- Nusferadi, A. (2008). Konteks Internasional Pasca-Perang Dunia II dan Langkah Awal Perjuangan Diplomasi RI. *Jurnal Sejarah Lontar*, 5(1).
- Poesponegoro, Marwati D. Notosusanto, N. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka.
- Prabowo, M. R. (2022). Kedaulatan Semu: Praktik Pemerintahan Negara dan Daerah Bentukan Belanda 1947-1948. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 16(1), 18–32.
- Pratama, R. A. (2018). Kecamuk Revolusi Kemerdekaan di Kuningan (1947-1950). *Jurnal Candrasangkala*, 4(2), 94-106.
- Pratama, S. (2023). Penerapan Strategi Perang Gerilya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 98–107.
- Prayuda, R. (2019). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(01), 80–93.
- Putro, W. S. (2018). Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949: Wujud Konsensus Nasional antara Republik Indonesia dengan Bijeenkomst voor Federaal Overleg. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(1), 34–42.
- Resultaten Van de Ronde Tafel Conferentie, zoals aanvaard tijdens de tweede algemene vergadering welke op 2 November 1949 werd gehouden in de Ridderzaal te 's-Gravenhage. Secretariaat-generaal Van de Ronde Tafel Conferentie, Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, (1949). “Hasil Konferensi Meja Bundar, sebagaimana diterima pada rapat umum kedua yang diadakan pada 2 November 1949 di Ridderzaal di Den Haag”. Sekretariat Jenderal Konferensi Meja Bundar, Perusahaan Percetakan dan Penerbitan Negara, (1949). Diakses di Delpher pada 15-10-2022.*

- Rahman, F. (2017). Menimbang Sejarah Sebagai Landasan Kajian Ilmiah, Sebuah Wacana Pemikiran Dalam Metode Ilmiah. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 128–150.
- Sekretariat. Negeri RI, (1986). *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Ridha, M. N. N., & Khoiruddin, M. (2018). Konsistensi Pengukuran Value at Risk pada Saham Syariah dengan Metode Historis. *Management Analysis Journal*, 7(1), 128–150.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Rinardi, H. (2012). Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun 1950. *Mozaik: Jurnal Ilmu Humaniora*, 12.
- Rizal, R. (2021). Peran Jenderal Soedirman Dalam Perang Griliya (Studi Historis Masa Agresi Militer Belanda II Tahun 1948-1949 Di Jawa Tengah). *Danadyaksa Historica*, 1(1), 12–24.
- Rochmiatun, E. (2013). Kedudukan Sejarah di Tengah Ilmu-Ilmu Lain. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 13(1).
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Sari, M, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA*, 6(2), 41–53.
- Sari, F. P. (2014). Konferensi Asia Di New Delhi 20-25 Januari 1949 (Bentuk Dukungan Negara-Negara Asia Kepada Indonesia Pasca Agresi Militer Belanda II). *Avatara*, 2(1).
- Sari, R. N. (2014). Dinamika Badan Permusyawarata Federal (BFO) Menuju Kedaulatan Indonesia. *Dinamika Badan Permusyawarata Federal (BFO) Menuju Kedaulatan Indonesia.*, 2(3).

- Sayono, J. (2021). Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(2).
- Schiller, A. A. (1955). *The Formation of Federal Indonesia 1945-1949*. Van Hoeve.
- Schurer, S. v. d. S. en F. (1948). *Wordt Beel landvoogd*.
- Sjamsuddin, H. (2018). Kiprah Pangeran Mohamad Noor Dalam Dinamika Politik Indonesia (1945-1967). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 1(2), 1–16.
- Suhartono, P. W. (2014). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu.
- Sukmana, W. J. (2021). Metode penelitian sejarah. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 1–4.
- Susanti, A. F. (2013). Negara Indonesia Timur Tahun 1946-1950. *Avatara*, 1(3).
- Susilo, A., & Wulansari, R. (2021). Perjanjian Linggarjati (Diplomasi dan Perjuangan Bangsa Indonesia Tahun 1946-1947). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1).
- Syamsuddin, K., Najamuddin, N., & Asmunandar, A. (2022). Takalar pada Masa NIT, 1946-1950. *Attoriolong*, 20(1).
- Syamsuri, H. (2013). Kritik Sejarah Islam Modern Abu Rabi'. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 23(1).
- Tanasaldy, T. (2014). *Regime Change and ethnic politics in Indonesia Dayak Politics of West Kalimantan*. KITLV.
- Tasnur, I., & Fadli, M. R. (2019). Republik Indonesia Serikat: Tinjauan Historis Hubungan Kausalitas Peristiwa-Peristiwa Pasca Kemerdekaan Terhadap Pembentukan Negara RIS (1945-1949). *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 5(2).

Van Klinken, G. (2014). *The making of middle Indonesia: Middle classes in Kupang Town, 1930s-1980s*.

Wasino, M., & Endah Sri, H. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*.

Zainal, F., & Dkk. (2020). The Dynamics Of Indonesia Lumajang Football Club In 1947-2018. *Jurnal Historica*, 4.